

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pendidikan Menengah Kejuruan**

Pendidikan kejuruan memiliki beberapa istilah di luar negeri. ILO (*International Labour Organization*) bersama UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) dalam kongres internasional kedua di Korea pada tahun 1999 menetapkan konsep pendidikan dan pelatihan teknikal dan kejuruan dengan nama *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) untuk pertama kalinya (Sudira, 2016: 1). Sejak saat itu terminologi TVET digunakan secara baku dalam semua kajian akademik dan literatur pendidikan kejuruan. UNESCO pada tahun 2005 menetapkan bahwa TVET konsern dengan proses pemerolehan pengetahuan dan kemampuan praktis untuk dunia kerja. TVET memberi pengetahuan teori dan praktik di sekolah serta lembaga pelatihan atau perusahaan (Sudira, 2016: 5).

Istilah *Further Education and Training* (FET) digunakan di Inggris dan Afrika Selatan. FET di Inggris dan Afrika Selatan berkonotasi sebagai pendidikan dan pelatihan orang dewasa (*adult education*). Pendidikan dan pelatihan kejuruan diperuntukkan bagi kaum dewasa yang akan memasuki dunia kerja. FET mensyaratkan batasan umur tertentu untuk memasuki pendidikan dan pelatihan kejuruan. Anak-anak yang belum memenuhi batasan

umur tidak diperkenankan memasuki FET karena merupakan pelanggaran atas aturan atau undang-undang ketenagakerjaan.

Negara-negara di Asia Tenggara menggunakan istilah *Vocational and Technical Education and Training* (VTET) yang intinya sama dengan TVET. Mereka menekankan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan serta pelatihan teknik dan kejuruan. VTET lebih menekankan dua hal yang berbeda, yaitu antara pendidikan yang berbau teori dan pelatihan yang berbau keahlian. Pendidikan memuat materi-materi umum yang bersifat normatif dan adaptif sedangkan pelatihan memuat praktikum pengembangan kemampuan motorik berbagai pekerjaan. Istilah *Vocational Education and Training* (VET) dan *Vocational and Technical Education* (VTE) digunakan di Australia. Pendidikan kejuruan di Australia juga sangat maju karena didukung oleh lembaga-lembaga risetnya yang sangat intens dalam melakukan kajian-kajian dan pengembangan pendidikan kejuruan.

Negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, dan Jepang menjalankan pendidikan kejuruannya dengan sangat baik sehingga perekonomiannya berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan mereka sangat menyadari bahwa pentingnya bekal pendidikan kejuruan dalam pekerjaan untuk perkembangan ekonomi (Nurhadi & Lyau, 2018: 295). Negara-negara di Asia Tenggara bahkan saat ini sangat menjadikan perkembangan pendidikan kejuruan sebagai kunci untuk menghadapi permasalahan berupa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial di masa depan (Grosch, 2017: 279). Beragamnya terminologi mengenai pendidikan kejuruan, secara moderat

Wenrich dan Galloway (Rasto, 2012: 2) mengemukakan bahwa terminologi pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, dan pendidikan okupasi digunakan secara bergantian. Terminologi-terminologi ini mungkin memiliki konotasi yang berbeda bagi para pembaca, namun sama-sama mengarahkan pada pendidikan untuk bekerja.

Pendidikan kejuruan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Para ahli dalam negeri pun turut serta dalam mendefinisikan pendidikan kejuruan. Hamalik (Rasto, 2015: 1) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Menurut Evans (Muliati, 2007: 7) pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. Djohar (2007: 1285) mengemukakan pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja yang profesional.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah sistem pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan dan keahlian tertentu dari peserta didiknya agar dapat bekerja dengan baik dan secara profesional.

Pavlova (Sudira, 2016: 7) menyatakan bahwa tujuan tradisional pendidikan kejuruan yaitu untuk menyiapkan lulusan untuk bekerja. Persiapan bekerja adalah tujuan utama dari pendidikan kejuruan. Agar siap bekerja maka pendidikan kejuruan memuat pelatihan khusus yang cenderung bersifat reproduktif sesuai perintah guru atau instruktur dengan fokus perhatian pada pengembangan kebutuhan industri, berisikan kemampuan khusus atau trik-trik yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Motivasi utama pendidikan kejuruan terletak pada keuntungan ekonomi untuk masa depan. Seiring dengan perkembangannya, TVET mulai memperhatikan pembangunan berkelanjutan dimana ekonomi bukan satu-satunya variabel pendidikan kejuruan.

Pelatihan berbasis kompetensi dipilih sebagai model pendidikan kejuruan. Rojewski (Sudira, 2016: 7) mengungkapkan bahwa tradisi pendidikan kejuruan mempersiapkan tenaga kerja terlatih dengan kompetensi tinggi yang sangat patuh pada atasan. John Dewey menentang pernyataan tersebut dan mengungkapkan bahwa tujuan dasar pendidikan bagi masyarakat umum adalah untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan setiap individu dengan pemenuhan pribadinya dan menyiapkan diri untuk kehidupannya. Hal ini menyiratkan bahwa semua peserta didik butuh untuk memperoleh dan mengenyam pendidikan kejuruan, berpikir bagaimana memecahkan masalah dengan cara-cara kreatif sesuai dengan potensisi yang dimilikinya. Dewey berpandangan bahwa peserta didik harus aktif dalam mencari ilmu sehingga tidak akan dikontrol oleh pasar ekonomi. Semua peserta didik harus mengenyam

pendidikan kejuruan karena setiap orang dihadapkan pada masalah-masalah yang memenuhi kebutuhan hidupnya (Sudira, 2016: 7).

Indonesia menggunakan nomenklatur pendidikan kejuruan pada tingkat menengah (*secondary education*) dan pendidikan vokasi pada tingkat pendidikan tinggi (*higher education*). Pendidikan kejuruan diselenggarakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki tugas mempersiapkan peserta didiknya dengan membekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan program keahlian, memiliki daya adaptasi, dan daya saing yang tinggi untuk memasuki lapangan kerja. Pengertian mengenai sekolah kejuruan terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 1 ayat 15 yang menyatakan bahwa:

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. SKL ini mengandung empat aspek pokok, yaitu: (1) meningkatnya kecerdasan dan pengetahuan; (2) dimilikinya kepribadian dan ahklak mulia

sebagai personifikasi dari pendidikan hati nurani; (3) dimilikinya keterampilan agar dapat menghidupi dirinya secara mandiri; (4) dapat menempuh studi lanjut sesuai bidang kejuruan yang telah diambil.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, memberikan rumusan bahwa, “Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.”

Selain itu, tujuan SMK juga tercantum dalam kurikulum SMK Edisi 2006 yaitu:

- a. Menyiapkan peserta didik agar menjadi produktif, mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dipilihnya.
- b. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan profesional.
- c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar dapat mengembangkan diri di kemudian hari.
- d. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Menurut Usman (2012: 16) tujuan utama pendidikan kejuruan adalah menyiapkan lulusan yang profesional untuk bekerja sesuai bidangnya. Lulusan yang dihasilkan harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara apa yang dipersiapkan dengan apa yang dibutuhkan.

Fungsi pendidikan menengah kejuruan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 pasal 76 ayat 2, yaitu:

- a. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
- b. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai nasionalisme.
- c. Membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
- e. Menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi.
- f. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Hadi mengemukakan tiga model penyelenggaraan pendidikan kejuruan (Muliati, 2007: 8-9). Model pertama, pemerintah tidak mempunyai peran atau hanya peran marginal dalam proses kualifikasi pendidikan kejuruan (*Market Oriented Model*) karena perusahaan memegang kekuasaan tertinggi. Negara yang menganut model ini adalah Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Model kedua, pemerintah sendiri merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol pendidikan kejuruan (*School Model*). Perancis, Italia, Swedia serta banyak dunia ketiga melaksanakan model ini. Model ketiga yaitu pemerintah dan perusahaan bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan (*Dual System Model*). Negara yang menerapkan sistem ini diantaranya Swiss, Austria

dan Jerman. Indonesia cenderung menerapkan model ketiga, dimana pelaksanaan pendidikan sistem ganda dilaksanakan di dua tempat yaitu di sekolah dan di industri dengan berbagai pengembangannya.

## 2. Informasi Terkait Dunia Kerja

Informasi sangat dibutuhkan bagi manusia dalam kondisi apapun. Menurut pandangan kognitif, manusia aktif dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah serta menyusun apa yang sudah mereka ketahui untuk mencapai wawasan baru (Danim & Khairil, 2014: 95). Menurut Simon (Tri Waano, 2013: 18), informasi adalah sesuatu yang didapatkan dari membaca, melihat langsung, dan mendengar sehingga dapat mengurangi serta menghilangkan ketidakpastian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa informasi sangat diperlukan oleh setiap manusia guna sebagai pertimbangan untuk mengambil sebuah tindakan sehingga dapat menghilangkan rasa keraguan. Semakin banyak informasi yang diterima maka seseorang akan semakin tanggap terhadap gejala-gejala yang ada di sekitarnya.

Terdapat banyak jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh setiap orang, termasuk informasi karir atau informasi dunia kerja. Informasi karir diperlukan untuk mendukung perkembangan bidang pekerjaan seseorang. Susanti (2014: 7) mengutarakan bahwa informasi dunia kerja meliputi masalah-masalah ketenagakerjaan seperti persyaratan memasuki pekerjaan, jenis pekerjaan yang dapat dimasuki, gaji dan kesejahteraan lain yang dapat diperoleh, kondisi sekarang dan masa depan.



Peserta didik dalam dunia pendidikan kejuruan agar dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik maka SMK harus membekali peserta didiknya dengan sejumlah pengetahuan tentang dunia kerja. Siswa/lulusan dapat mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan beserta lowongan pekerjaan berdasarkan informasi yang diterima.

Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2007: 319) informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat (*fields occupation*), mengenai posisi dalam suatu pekerjaan (*level of occupation*), mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klasifikasi jabatan, dan mengenai prospek ke depan berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat akan jenis pekerjaan tertentu. Bentuk informasi yang lengkap mengenai dunia kerja menurut Winkel dan Sri Hastuti (2007: 320) yaitu angkatan kerja, posisi yang dibutuhkan, pergeseran-pergeseran yang kiranya akan terjadi, perundang-undangan yang berlaku, variasi sumber informasi yang mengikuti perkembangan angkatan kerja, deskripsi berbagai jenis pekerjaan dan jabatan, variasi program pendidikan prajabatan bagi beraneka pekerjaan yang mensyaratkan hal itu, cara melamar pekerjaan, secara tertulis dan secara lisan, makna pekerjaan dalam kehidupan seseorang, beraneka kondisi pekerjaan yang menopang atau merugikan kesehatan jasmani dan kesehatan moral

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tentang Ketenagakerjaan pada Bab IV pasal 8 tentang Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa informasi ketenagakerjaan meliputi informasi mengenai penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan

kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Informasi dunia kerja sangatlah diperlukan untuk mengambil kebijakan memilih pekerjaan bagi siswa yang memiliki semangat masuk dunia kerja. Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2007: 324-325), sumber bahan informasi harus akurat, tepat, jelas, dan relevan. Bahan informasi harus disajikan secara menarik, bebas dari segala faktor subjektif, dan dapat bermanfaat.

Informasi dunia kerja yang baik dan memadai untuk siswa akan memberikan informasi pekerjaan yang terbaru, tepat, berguna, dan lengkap mengenai pekerjaan yang tersedia bagi pencari kerja. Informasi tentang pekerjaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar, pamflet yang disebar oleh perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Semua informasi tersebut dapat ditemukan di perpustakaan, pusat informasi pekerjaan, internet, ataupun media sosial. Bagi siswa SMK untuk mencari informasi pekerjaan bisa melalui bimbingan karir di sekolah. Mereka nantinya dapat mengetahui tentang keadaan pekerjaan yang tersedia, kesempatan kerja dan persyaratan untuk memasuki dunia kerja guna mendukung siswa/lulusan untuk mempersiapkan diri agar dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan kompetensi keahlian.

### 3. Penyaluran Lulusan SMK

Menurut KBBI penyaluran berasal dari kata dasar salur yang memiliki arti alir atau arah. Penyaluran adalah proses, cara, dan perbuatan menyalurkan, sedangkan menyalurkan adalah mengalirkan atau mengarahkan. Sedangkan

lulusan menurut KBBI adalah yang sudah lulus dari ujian, atau tamatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka penyaluran lulusan dapat diartikan sebagai suatu proses menyalurkan atau mengarahkan seseorang/sesuatu yang telah dinyatakan lulus atau telah melewati ujian. Penyaluran lulusan dalam konteks ini dilaksanakan untuk menyalurkan atau mengarahkan lulusan agar dapat terserap ke dunia kerja yang tepat dan sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dimilikinya.

Lulusan merupakan hasil dari proses pendidikan yang telah dilakukan dari sekolah yang telah menyelesaikan proses studi. Lulusan hanyalah sebuah *output* dari SMK namun bukan menjadi tujuan akhir. SMK dipandang sebagai sistem, harus bertanggungjawab terhadap pemasaran atau penyaluran lulusan. SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dibentuk untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, tolak ukur keberhasilan SMK tidak hanya dilihat dari siswanya yang telah menyelesaikan program studi dan mempunyai bekal untuk memasuki dunia kerja, melainkan juga dari seberapa besar perannya dalam menyalurkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja yaitu dengan cara rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Tahapan yang dilakukan dalam penyaluran lulusan ke dunia kerja adalah sebagai berikut.

#### a. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan kegiatan awal yang sangat penting dilakukan untuk mendapatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk mengisi jabatan pada suatu organisasi. Sulistiyani dan Rosidah (Yusuf, 2015: 94) berpendapat bahwa rekrutmen sebagai proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat para pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Veithzal Rivai (Suwatno & Donni, 2013: 62), menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik pelamar, yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh penyelenggara untuk ditempatkan pada suatu posisi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara. Jadi, kegiatan rekrutmen dilakukan untuk memperoleh dan menarik pelamar sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan lowongan yang tersedia, dan memiliki potensi untuk menjadi tenaga kerja, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti iklan di media massa, departemen tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan sebagainya.

Kaitannya dengan Bursa Kerja Khusus, rekrutmen adalah kegiatan yang sangat penting. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan setelah BKK menginformasikan lowongan pekerjaan yang tersedia kepada siswa/alumni sekolah. BKK menarik para peserta sebanyak-banyaknya, dan mendatanya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

#### b. Seleksi

Para pelamar yang telah terekrut belum bisa langsung ditentukan mana yang telah memenuhi kualifikasi dan mana yang tidak dalam proses rekrutmen, maka dari itu dibutuhkan kegiatan seleksi. Wilson (2012: 160) berpendapat bahwa proses seleksi adalah serangkaian kegiatan untuk memilih karyawan terbaik untuk ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Mathis dan Jackson (2011: 261) berpendapat bahwa seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan.

Dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah proses yang dilakukan setelah perekrutan untuk memilih tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Seleksi dilakukan untuk memilih para tenaga kerja yang tepat dan sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan di dalam perusahaan.

BKK dalam melakukan seleksi hanya sebagai fasilitator dan hanya melakukan seleksi pada berkas lamaran saja. Terdapat dua cara seleksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu seleksi yang dilakukan di perusahaan tersebut dan seleksi yang dilakukan di sekolah dengan BKK sebagai fasilitator.

### c. Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja disebutkan pada ayat 1 yaitu, “Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.” Malayu S.P Hasibuan (2009: 63) berpendapat bahwa penempatan merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang diterima (lulus seleksi) pada pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan pada orang tersebut.

Penempatan tenaga kerja dapat disimpulkan sebagai pelayanan yang diberikan kepada pencari kerja untuk menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, sebagai tindak lanjut dari seleksi. Kegiatan penempatan tenaga kerja di lembaga satuan pendidikan menengah maupun tinggi dilakukan oleh BKK dengan menyampaikan laporan kegiatan penempatan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Doni Muhandiansyah (2010: 21) dalam bukunya memaparkan proses Penyaluran Tamatan melalui BKK, yaitu:

- 1) BKK menerima permintaan tenaga kerja dari pihak industri.
- 2) BKK memberikan informasi lowongan kerja kepada alumni melalui pengumuman yang dipampang di sekretariat BKK.
- 3) Alumni mendaftarkan diri dan menyerahkan lamaran kerja kepada BKK.

- 4) BKK melakukan seleksi lamaran dan mengirimkan data lamaran kerja ke perusahaan yang meminta.
- 5) Perusahaan menerima data lamaran kerja beserta berkas lamaran yang dikirim oleh sekolah setelah melakukan proses seleksi di BKK. Jika sesuai akan dilakukan panggilan tes kerja dan seleksi oleh perusahaan. Hasil seleksi diserahkan kepada BKK.
- 6) Pihak sekolah/BKK mengumumkan hasil seleksi kepada alumni.
- 7) BKK mencatat laporan dari alumni yang diterima ataupun yang tidak diterima pada data alumni.

#### 4. Bursa Kerja Khusus (BKK)

##### a. Pengertian BKK

Bursa Kerja merupakan suatu lembaga yang berfungsi merekrut tenaga kerja baru dan kemudian didistribusikan ke DU/DI sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sesuai peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa, Bursa Kerja adalah lembaga yang menjalankan fungsi penempatan untuk mempertemukan antara para pencari kerja dengan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan (Depnaker RI, Dirjen Binapenta, 2013: 4). Menurut Carol C. Kanar dalam bukunya yang berjudul *The Confident Student* (Hardiani, 2017: 9) mengatakan bahwa bursa kerja adalah sebuah kegiatan dimana perusahaan mendirikan *stand* dan mengirim perwakilan untuk mengumpulkan *resume* dan menyaring kandidat yang berpotensi untuk mengisi posisi yang mereka butuhkan.

Berdasarkan tujuan untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna kerja dan memperkecil kesenjangan informasi dunia kerja maka dibentuklah bursa kerja yang mengikutsertakan lembaga pendidikan dalam pelayanan antar kerja, yaitu dengan dibentuknya Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK. Izin penyelenggaraan BKK di tingkat pendidikan menengah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendekatkan antara peluang kerja yang ada dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, yaitu lulusan maupun calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja. Hal ini diharapkan dapat lebih memudahkan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja karena informasi tentang kesempatan kerja lebih mudah didapatkan dan adanya program penyaluran kerja oleh BKK.

b. Tujuan BKK

Menurut Perjanjian Kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa “Bursa Kerja di satuan pendidikan menengah bertujuan untuk memberikan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja bagi para siswa dan tamatan sekolah yang bersangkutan, mencakup pemberian informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan karir.” Menurut Dinas Pendidikan Jawa Tengah (2010: 4), secara eksplisit tujuan dari BKK adalah sebagai berikut.

- 1) Mempertemukan tamatan SMK dengan DU/DI.
- 2) Memberikan peluang saling berinteraksi antara lulusan SMK dan DU/DI untuk menawarkan kompetensi yang dimiliki.



- 3) Meningkatkan hubungan kerjasama SMK dengan DU/DI.
- 4) Meningkatkan wawasan lulusan SMK tentang peluang kerja di DU/DI.
- 5) Terjadinya proses rekrutmen sesuai dengan formasi kerja dan kompetensi yang dibutuhkan.
- 6) Terserapnya lulusan ke dunia kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BKK memiliki tujuan untuk mempertemukan lulusan dengan dunia kerja agar para lulusan dapat terserap di DU/DI sesuai dengan kompetensinya dan hubungan kerjasama SMK dan DU/DI akan semakin meningkat. Selain itu, BKK sebagai prantara memberikan kemudahan bagi para pencari kerja untuk terjun ke DU/DI. Jadi, dengan adanya BKK diharapkan agar setiap lulusan dapat dengan mudah terserap di dunia kerja, dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya.

#### c. Fungsi BKK

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Buku Panduan Sistem Pusat Karir menjelaskan bahwa fungsi BKK (Hardianti, 2017: 12) yaitu:

- 1) Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat dan keterampilannya.
- 2) Membantu perusahaan pengguna tenaga kerja untuk menyediakan dan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan profesional.
- 3) Melaksanakan rekrutmen tenaga kerja melalui bursa kerja.
- 4) Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja.

Luh Masdarini (2014: 593) juga berpendapat mengenai fungsi dari BKK yaitu untuk mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna kerja. BKK merupakan jembatan antara SMK dengan dunia industri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatan utama BKK antara lain memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan pencari kerja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari BKK adalah memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan termasuk memberikan informasi ketenagakerjaan kepada siswa dan alumni mulai dari menerima, menampung, mengidentifikasi, mendata jenis-jenis informasi yang didapat dari dunia kerja, dan menyampaikan informasi tersebut kepada siswa dan alumni sekolah yang bersangkutan kemudian menjalin kerjasama dengan pihak dunia kerja, melaksanakan kegiatan rekrutmen, memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta meningkatkan penempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. BKK juga berfungsi untuk membantu pelaksanaan pengembangan dan penyempurnaan karir siswa dan lulusannya bekerjasama dengan unit bimbingan konseling.

#### d. Sistem Pelaksanaan BKK

##### 1) Dasar Hukum Pelaksanaan BKK

Dasar hukum pelaksanaan BKK adalah landasan yuridis yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program ataupun kegiatan dan untuk mencapai tujuannya. Menurut Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan

Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri (No. KEP-49/DPPTKDN/2003 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus), dasar-dasar hukum BKK, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan
- b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan
- e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja
- f) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri
- g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
- h) Departemen Tenaga Kerja No. 009/C/KEP/U/1994 dan No. KEP.02/BP/1994 tentang Pembentukan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan Pemanduan Penyelenggara Bursa Kerja

Berdasarkan pedoman dasar hukum di atas, maka BKK diharapkan dapat melaksanakan aktivitasnya secara teratur dan sistematis, mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai evaluasi, agar semua kegiatan BKK dapat terarah dan adanya pijakan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2) Ruang Lingkup Kegiatan BKK

BKK dalam menjalankan segala aktivitas pelayanannya harus sesuai dengan ruang lingkup atau cakupan kegiatan BKK, menurut Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (2016: 17), ruang lingkup kegiatan BKK berdasarkan mekanisme antar kerja meliputi:

- a) Pendaftaran dan pendataan pencari kerja yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihannya.

- b) Pendataan lowongan kesempatan kerja.
- c) Pemberian bimbingan kepada pencari kerja lulusannya untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuannya sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri.
- d) Penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai persediaan tenaga kerja.
- e) Pelaksanaan verifikasi sebagai tindak lanjut dan pengiriman dan penempatan yang telah dilakukan.
- f) Pelaksanaan kegiatan Pameran Bursa Kerja (*Job Fair*) dan kegiatan sejenisnya.

Selain itu, ruang lingkup kegiatan BKK menurut Buku Panduan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (2015: 15-16), yaitu:

- a) Penyusunan database siswa lulusan SMK sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pencari tenaga kerja dan penelusuran tamatan siswa SMK.
- b) Menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke dunia usaha maupun kerjasama dengan lembaga penyalur tenaga kerja dan Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
- c) Membuat leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke DU/DI.
- d) Penyaluran calon tenaga kerja lulusan SMK ke DU/DI.

- e) Melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja melalui kegiatan peninjauan dan verifikasi.
- f) Mengadakan program pelatihan keterampilan tambahan/khusus bagi siswa dan lulusan SMK disesuaikan dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- g) Mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses penerimaan siswa dalam suatu pekerjaan (wawancara, psikotest).
- h) Memberikan informasi kepada para alumni ataupun para lulusan SMK yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja.

Jadi, ruang lingkup kegiatan kerja BKK khususnya di SMK yaitu, BKK mengumpulkan informasi pekerjaan dari berbagai pihak, lalu informasi tersebut diberikan kepada siswa maupun lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendaftar. Setelah BKK merekrut para lulusan, selanjutnya para lulusan akan mengikuti seleksi sebagai calon tenaga kerja. Setelah itu BKK akan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon tenaga kerja tersebut agar dapat diketahui bakat, minat, kompetensi atau kemampuan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sekarang. Kegiatan selanjutnya, lulusan disalurkan sebagai calon tenaga kerja yang siap ditempatkan atau dikirim ke dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Kemudian setelah kegiatan penyaluran atau penempatan, BKK akan melakukan verifikasi dengan industri tempat kerja sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatan yang telah dilakukan.

### 3) Tugas dan Tanggung Jawab Bursa Kerja Khusus (BKK)

Tugas dan tanggung jawab bursa kerja di satuan pendidikan menengah menurut Perjanjian Kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia pasal 5 ayat 4, yaitu:

- a) Memberikan pelayanan antar kerja kepada siswa dan tamatan sekolah menengah yang bersangkutan, meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan karir, pendaftaran pencari kerja dan bertanggung jawab mengusahakan penempatannya, baik melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Daerah dan Antar Kerja Negara serta penyediaan tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan sambil bekerja (*on the job training*) baik di dalam maupun di luar negeri.
- b) Memberikan pelayanan antar kerja kepada pemberi kerja meliputi informasi penyediaan tenaga kerja dan bertanggung jawab mengusahakan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

Kemudian dalam buku Manajemen Bursa Kerja Khusus, Hermansyah, dkk. (2009: 13-14) berpendapat bahwa secara garis besar tugas Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja adalah sebagai berikut.

- a) Memberi pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada pelajar/siswa/mahasiswa dan alumni yang akan memasuki lapangan/dunia kerja.
- b) Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta, termasuk dunia usaha dan alumni dalam pengadaan informasi ketenagakerjaan termasuk informasi tentang latihan kerja dan penyalurannya sebagai tenaga kerja.
- c) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi calon pekerja/karyawan atas permintaan bantuan baik dari Depnaker/Lembaga Pemerintah lain atau Swasta atas bimbingan Departemen Tenaga Kerja.

- d) Membina hubungan dengan alumni yang telah bekerja dan berhasil dalam bidang usaha untuk membantu memberi peluang menyalurkan, menempatkan alumni baru dari almamaternya yang memerlukan pekerjaan.
- e) Membantu usaha pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan dan memperhatikan tuntutan lapangan kerja serta meningkatkan peran tenaga pengajar dalam pembinaan karir siswa/pelajar/mahasiswa dan alumni.
- f) Melakukan kegiatan pengembangan SDM meliputi pengembangan *soft skill* dan *hard skill*

Berdasarkan uraian di atas, tugas BKK adalah memberikan pelayanan kepada para siswa dan lulusan, membina kerjasama dengan pihak DU/DI, mengadakan kegiatan rekrutmen dan seleksi. Selain itu, BKK harus bertanggung jawab untuk mengusahakan segala kebutuhan tenaga kerja, mulai dari penyediaan informasi lowongan pekerjaan, memberikan penyuluhan dan bimbingan karir, melakukan kegiatan pengembangan *soft skill* dan *hard skill*, hingga penempatannya melalui sistem Antar Kerja. Kemudian Bursa Kerja Khusus juga diawasi dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya, seperti yang dinyatakan pada pasal 9, yaitu “pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bursa kerja serta pelaksanaan pemanduan penyelenggara bursa kerja dilaksanakan secara terpadu oleh Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing”.

Bursa Kerja Khusus diawasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini perlu diawasi agar BKK dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar BKK dapat menjadi wadah yang tepat untuk menyalurkan lulusan sehingga keterserapan lulusan ke dunia kerja akan terus mengalami peningkatan dan tingkat pengangguran semakin berkurang.

#### 4) Pembiayaan/Anggaran Bursa Kerja Khusus (BKK)

Menurut Perjanjian Kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 076/U/1993 dan No. KEP,215/MEN/1993 pada Bab XI pasal 10, menyatakan bahwa:

Biaya pelaksanaan kegiatan bursa kerja di satuan pendidikan menengah dibebankan pada unit kerja masing-masing dan dari segi imbalan jasa antar kerja yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk membiayai pelaksanaan pemanduan penyelenggara bursa kerja di satuan pendidikan menengah dibebankan kepada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Anggaran BKK dalam melaksanakan kegiatan dibebankan pada masing-masing BKK, dan dari imbalan jasa antar kerja, sementara itu untuk biaya pemanduan penyelenggara BKK yang meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan antar kerja yang diberikan kepada guru pembimbing, bagian tata usaha atau guru yang ditunjuk sekolah terkait, berasal dari Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



#### 5) Pertanggungjawaban Kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK)

BKK melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatannya secara periodik. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pasal 12 menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BKK setiap bulan, triwulan dan tahunan harus dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada Menteri Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan menggunakan formulir.

Pasal 14 menjelaskan apabila BKK tidak melaporkan kegiatannya atau tidak melakukan kegiatan selama 6 bulan berturut-turut akan dilakukan evaluasi dan pembinaan. Apabila setelah diadakan evaluasi dan pembinaan, BKK tidak melakukan kegiatan selama 12 bulan berturut-turut dan diperkuat dengan tidak adanya laporan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat mencabut Surat Persetujuan Pendirian BKK.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban segala kegiatan yang dilakukan BKK yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan secara berkala kepada instansi bidang ketenagakerjaan di daerah setempat, laporan tersebut harus memuat data lulusan, lowongan pekerjaan yang terdaftar serta lulusan yang terserap di dunia kerja. Apabila BKK tidak memberikan laporan selama 6 bulan maka akan mendapatkan sanksi berupa evaluasi dan pembinaan, namun apabila laporan tidak diberikan selama 12 bulan, maka izin pendirian BKK akan dicabut.

e. Indikator Keberhasilan Bursa Kerja Khusus

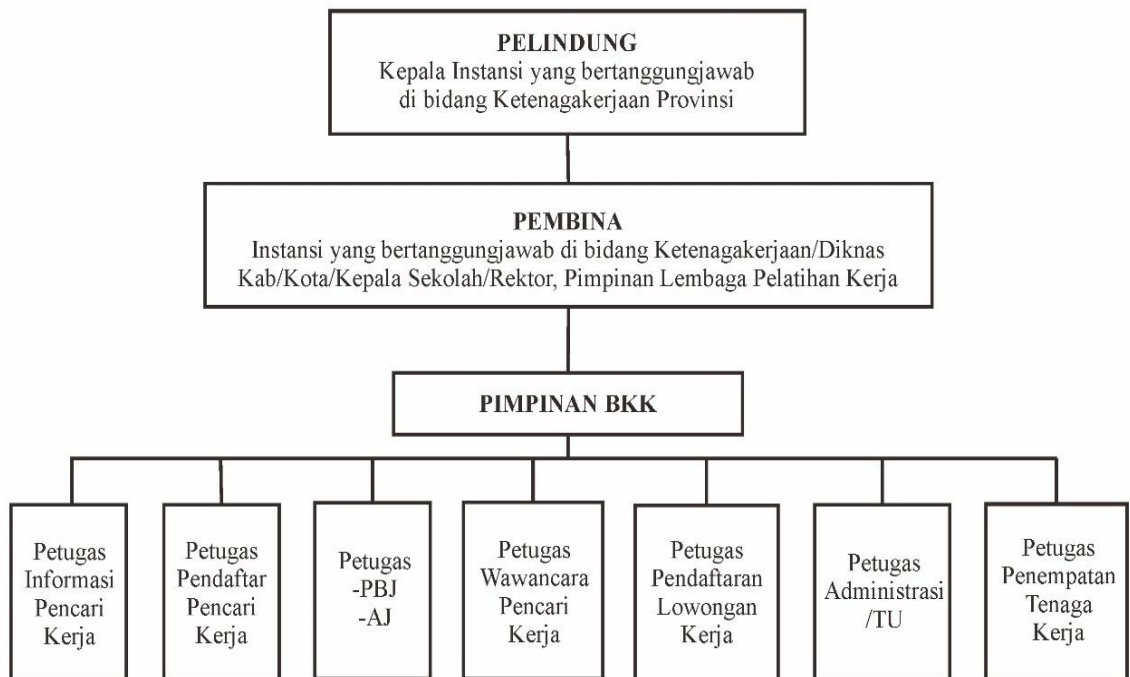
BKK mempunyai tolak ukur yang menjadi indikator keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut diatur oleh Direktorat Pembinaan SMK. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Mengembangkan Kerja Sama yang Efektif antara Lembaga Diklat Kejuruan dan Industri: Pedoman Pelaksanaan (2016: 30) yang dikembangkan oleh *Tim Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET)*, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tercapainya pelayanan informasi ketenagakerjaan pada tamatan SMK yang bermanfaat bagi alumni dalam memudahkan akses lowongan pekerjaan sesuai dengan relevansi kompetensi, potensi dan analisis jabatan (informasi lowongan kerja).
- 2) Adanya data tamatan SMK yang valid sesuai dengan kualifikasi alumni, sehingga akan mempermudah DU/DI dalam mengakses data dalam rangka pemenuhan calon tenaga kerja (database tamatan).
- 3) Adanya data keterserapan tamatan SMK untuk mengetahui sejauh mana jumlah tamatan yang telah terserap di DU/DI (laporan keterserapan).
- 4) Adanya data penelusuran tamatan, untuk mengetahui keberadaan tamatan baik yang bekerja, wirausaha, melanjutkan pendidikan dan yang belum bekerja. Kegiatan ini dilakukan secara periodik.
- 5) Tercapainya pengembangan hubungan kerja sama dengan DU/DI yang dibuktikan dengan adanya MoU, baik berkaitan dengan proses rekrutmen maupun MoU dalam bidang lain.

- 6) Terjalinnnya hubungan alumni SMK dengan sekolah yang dibuktikan dengan terbentuknya ikatan alumni dari SMK tersebut (*website* alumni).
- 7) Adanya sinkronisasi pembelajaran antara DU/DI dengan sekolah sehingga ada kesamaan program pembelajaran yang ada di sekolah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan (adanya kegiatan sinkronisasi dan validasi kurikulum).
- 8) Adanya pembelajaran *soft skill*, sebagai bekal masuk dunia kerja dengan menghadirkan narasumber dari perusahaan atau biro konsultasi.

f. Struktur Organisasi BKK

Berikut adalah struktur organisasi yang didirikan di SMK menurut Disnakertrans.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BKK (Dirjen Binapenta Dalam Negeri, 2013: 14)

## 5. Evaluasi

### a. Pengertian Evaluasi

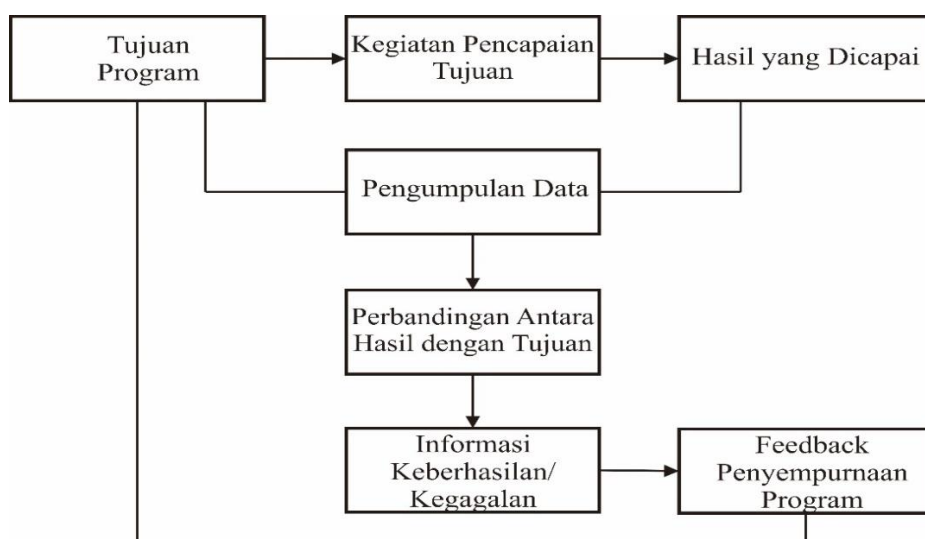
Menurut Wayan Nurkencana (Zaini, 2009: 142) evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Stufflebeam dikutip dari Nursalim (2009: 9) menyampaikan bahwa evaluasi dilaksanakan dengan proses menggambarkan, mengamati dan mengumpulkan informasi-informasi penting. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan langkah alternatif dalam pengambilan keputusan. Keakuratan informasi sangat mempengaruhi keputusan evaluasi yang akan diambil. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Amat Jaedun (2010: 4) bahwa riset evaluasi mempunyai ciri *decision oriented*, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi/data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/perumusan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuniarti (2016: 223) yang mengatakan bahwa hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian dan manfaat yang dirasakan berdasarkan tujuan yang telah ditargetkan.

Weiss (1984: 6-7) menyatakan bahwa penelitian evaluasi adalah penelitian terapan yang merupakan cara yang sistematis untuk mengetahui efektivitas suatu program, tindakan, atau kebijakan yang diteliti bila dibandingkan dengan tujuan atau standar yang ditetapkan. Penelitian evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas suatu kebijakan atau program, berdasarkan umpan balik dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Weiss juga menyatakan bahwa evaluasi adalah metode penelitian yang spesifik.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian-pengertian tersebut yaitu bahwa evaluasi adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu program/kebijakan berjalan, apakah sudah baik atau belum. Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui tindakan apa yang harus diberikan terhadap program/kebijakan yang telah dievaluasi (mengambil keputusan), apakah program/kebijakan tersebut dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan. Sehingga evaluasi bermanfaat untuk menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan standar yang ada.

Cresweel (Sugiyono, 2013: 740) mengenai evaluasi pendidikan menyatakan bahwa “*Evaluation research involves assessing the quality of study using standards advanced by individuals in education*”. Penelitian evaluasi adalah melakukan pengukuran terhadap kualitas sesuatu yang dipelajari menggunakan standar dan melibatkan individu-individu dalam pendidikan.

Konsep dasar pada penelitian evaluasi ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Konsep Dasar Penelitian Evaluasi (Sugiyono, 2013: 742)

Isaac (1984: 6) membedakan model evaluasi program berdasarkan orientasinya, yaitu model yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), model yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented*), model yang berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya, dan model yang berorientasi pada pengaruh dan dampak program. Sementara itu, secara umum beberapa ahli membedakan model evaluasi menjadi delapan model, yaitu:

- 1) *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
- 2) *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
- 3) *Formatif Sumatif Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
- 4) *Countenance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- 5) *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
- 6) *CSE-UCLA Evaluation Model*.
- 7) *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam.
- 8) *Discrepancy Model*, dikembangkan oleh Provus.

b. *Discrepancy Model*

Model ini juga dikenal dengan istilah model kesenjangan yang dikembangkan oleh Malcom Provus. Menurut Provus evaluasi model kesenjangan adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standard*) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program.

Kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi:

- 1) kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program;
- 2) kesenjangan antara yang diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan;
- 3) kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan;
- 4) kesenjangan tujuan;
- 5) kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah; dan
- 6) kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten.

Oleh karena itu model evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Adhi Yoga Pambayun pada tahun 2014 dengan judul “Kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model *discrepancy*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BKK ditinjau dari dimensi input secara umum masuk dalam kategori rendah dengan kesenjangan antara rata-rata skor kinerja dari seluruh BKK dengan skor maksimum sebesar 58,12%. Ditinjau dari dimensi proses, secara umum masuk dalam kategori rendah dengan kesenjangan antara rata-rata skor kinerja dari seluruh BKK dengan skor maksimum sebesar 51,71% (*discrepancy* tinggi). Ditinjau dari dimensi *output*, secara umum masuk kategori rendah dengan kesenjangan antara rata-rata skor kinerja dari seluruh BKK dengan skor maksimum sebesar 66,44% (*discrepancy* tinggi).

2. Penelitian relevan juga dilakukan oleh Zulvita Qomariana (2016) berjudul “Peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam Membantu Penyaluran Kerja Lulusan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta.” Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian ini adalah pengurus BKK SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berjumlah 6 orang serta siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 68 orang. Penelitian ini menghasilkan: (1) Persentase peran BKK dalam mencari dan melayani siswa mengenai informasi kerja sebesar 71,56% (cukup); (2) Persentase peran BKK pada indikator pembinaan dan pembekalan kerja adalah sebesar 50,00% (kurang); (3) Persentase peran BKK pada indikator hubungan kerja sama dengan instansi-instansi terkait sebesar 80,30% (tinggi); (4) Persentase peran BKK pada indikator penelusuran lulusan sebesar 75,00% (cukup).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lailatul Muktamiroh dengan judul “Peran dan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai Sarana Pemenuhan Tenaga Kerja bagi Siswa Kompetensi Keahlian Jasa Boga di SMK N 4 Yogyakarta, SMK N 6 Yogyakarta, dan SMK N 2 Godean”. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Peran dan fungsi BKK di SMKN 4 Yogyakarta secara keseluruhan dalam kategori tinggi 65,38%, di SMKN 6 Yogyakarta secara keseluruhan dalam kategori tinggi 78,84% dan di SMKN 2 Godean secara keseluruhan dalam kategori sangat tinggi 84,61%; (2) Persepsi siswa Jasa Boga di SMKN 4 Yogyakarta terhadap peran & fungsi BKK secara



keseluruhan sebesar 98,49%, persepsi siswa Jasa Boga di SMKN 6 Yogyakarta terhadap peran & fungsi BKK secara keseluruhan sebesar 100% dan persepsi siswa Jasa Boga di SMKN 2 Godean terhadap peran & fungsi BKK secara keseluruhan sebesar 96%; 3) Kinerja BKK di SMKN 4 Yogyakarta sebesar 65,38%, kinerja BKK di SMKN 6 Yogyakarta sebesar 78,84% dan kinerja BKK di SMKN 2 Godean sebesar 84,61% sehingga disimpulkan kinerja BKK tertinggi dilakukan oleh BKK SMKN 2 Godean dan kinerja BKK terendah dilakukan oleh BKK SMKN 4 Yogyakarta.

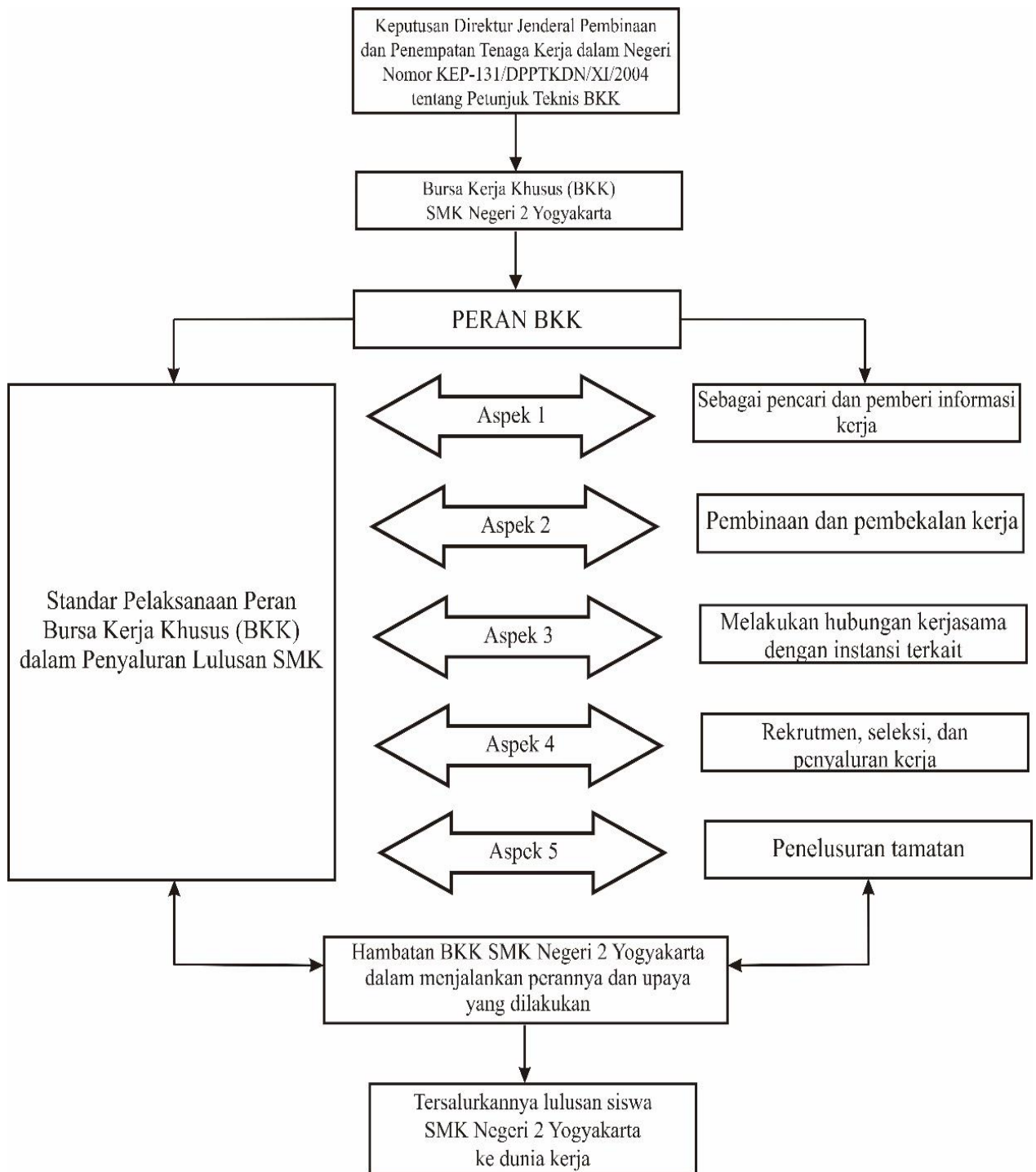
### **C. Kerangka Berpikir**

Kemampuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menyalurkan lulusan ke dunia kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan SMK, karena sebuah proses SMK merupakan sistem yang utuh mulai dari masukan, proses, sampai pada pengelolaan lulusan. Keberhasilan SMK bisa dinilai tidak sekedar bagaimana SMK mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar secara baik, tetapi ditentukan oleh kemampuan SMK dalam bertanggung jawab terhadap lulusan sebagai produk yang dihasilkan oleh SMK.

Orientasi dari SMK adalah menghasilkan lulusan yang siap bekerja, maka keberhasilan SMK diukur dari kemampuan menghasilkan lulusan yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan SMK adalah seberapa besar lulusannya dapat terserap di dunia kerja.

Calon lulusan maupun alumni membutuhkan suatu wadah untuk membantu menyalurkan mereka sebagai tenaga kerja ke dunia kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya masing-masing. Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan usaha yang dibentuk oleh sekolah untuk membantu menyalurkan peserta didiknya ke dunia kerja. Diharapkan dengan adanya peran yang optimal, maka lulusan dapat segera tersalurkan ke dunia kerja melalui BKK. Namun, masih belum banyak lulusan yang bekerja melalui bantuan dari BKK, pemberian informasi pekerjaan juga kurang lengkap, serta lulusan belum terlalu memanfaatkan BKK dalam mencari informasi lowongan pekerjaan.

Peran BKK perlu mendapat perhatian terkait permasalahan yang ditemukan. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi juga diharapkan dapat diatasi dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan, sehingga nantinya BKK dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan peran serta tugas dan fungsinya. Berikut merupakan skema untuk memperjelas kerangka pikir berikut.



Gambar 3. Skema Kerangka Pikir

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah adanya kesenjangan dari pelaksanaan peran BKK dalam penyaluran lulusan siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta ke dunia kerja apabila ditinjau dari 5 aspek berikut:
  - a. sebagai pencari dan pemberi layanan informasi kerja untuk siswa
  - b. pembinaan dan pembekalan kerja kepada siswa/alumni
  - c. melakukan hubungan kerjasama dengan instansi terkait
  - d. rekrutmen, seleksi, dan penyaluran kerja lulusan
  - e. penelusuran tamatan
2. Hambatan apa yang dialami oleh BKK SMK Negeri 2 Yogyakarta dalam menjalankan perannya yaitu menyalurkan lulusannya di dunia kerja apabila ditinjau dari 5 aspek tersebut dan bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk mengatasinya.